



HARIAN LENTERA

Edisi Kamis, 30 November 2023

KORAN DIGITAL
LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat
12 Halaman
download edisi digital
www.lenteratoday.com
**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

www.lenteratoday.com

@lenteratoday

f lentera.tv

@lenteratoday

Lentera TV Media

LenteraPodcast

@lenteratoday

DARURAT PEMILU 2024 204 JUTA DATA PEMILIH MILIK KPU BOCOR

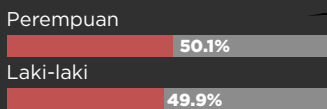
Pemilu 2024 makin dekat, sekitar 2,5 bulan lagi 'coblosan' Pilpres dan Pileg dilakukan. Kekhawatiran soal kerawanan pencurian data pemilih pun sudah menjadi nyata. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mengakui sedang mengusut adanya dugaan kebocoran data pemilih tetap (DPT) di situs web Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data pemilih yang diduga bocor sebanyak 204 juta itu dijual oleh peretas melalui situs Breach Forums dengan harga Rp 1,1 miliar. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membantah dugaan kebocoran itu dilandasi oleh motif politik. Ditegaskannya murni karena motif ekonomi. Ngerinya, data yang diekspos sangat detail. mencakup Nomor Induk Kependudukan alias NIK, Nomor Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atau KTP maupun paspor. Selain itu, memuat nama lengkap, jenis kelamin, tanggal dan tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS. Kalangan pengamat pun menegaskan kondisi ini sangat berbahaya. Salah satunya, saat Pemilu yang akan digelar pada Februari 2024, data ini dapat digunakan untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara. Nggak bahaya ta?!

(Baca Hal 11)

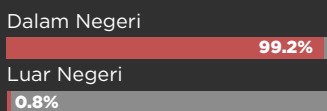
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) NASIONAL PEMILU 2024

TOTAL 204.807.222

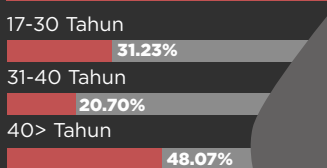
Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan Lokasi



Berdasarkan Umur



POLITICA (Hal.3)
Di Tengah Puja-puja
KSAD Maruli,
Ada Kecurigaan
demi Kepentingan
Jokowi

Wabah Pneumonia Misterius Menggila di China Kemenkes Minta Bandara-Pelabuhan Diperketat, Layanan Kesehatan Siaga

JAKARTA-Kabar buruk dunia kesehatan datang lagi dari China. Lonjakan penyakit pernapasan atau belakangan disebut pneumonia misterius di kalangan anak-anak membuat rumah sakit tingkat kota Negeri Naga kewalahan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Indonesia pun secara resmi meminta semua jajarannya siaga menyusul adanya peningkatan kasus undefined pneumonia tersebut. Hal itu mengacu pada laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Kemenkes juga meminta pintu-pintu kedatangan warga negara asing (WNA) seperti pelabuhan dan bandara udara diperketat. Hal itu menyusul kasus tinggi Pneumonia di China. Imbauan itu Kemenkes tuangkan dalam Surat Edaran Nomor: PM.03.01/C/4632/2023 tentang Kewaspadaan Terhadap Kejadian Mycoplasma Pneumonia di Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu.

"Meminta KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) untuk meningkatkan pengawasan terhadap orang (awak, personel, dan penumpang), alat angkut, barang bawaan, lingkungan, vektor," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11/2023).

"Binatang pembawa penyakit di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas negara, terutama yang berasal dari negara terjangkau," lanjutnya.

Kemenkes pun melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menerbitkan Surat Edaran Nomor: PM.03.01/C/4632/2023 tentang Kewaspadaan Terhadap Kejadian Mycoplasma Pneumonia di Indonesia.

Surat edaran itu terbit pada 27 November 2023 dan ditunjukkan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur/Kepala Rumah Sakit, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan hingga Kepala Puskesmas di Indonesia. "Penerbitan surat edaran tersebut bertujuan mengantisipasi penyebaran pneumonia di Indonesia," katanya

Dalam surat edaran itu, Maxi juha meminta Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk melakukan pemantauan perkembangan kasus dan negara terjangkau di tingkat global serta meningkatkan kewaspadaan dini dengan melakukan pemantauan kasus dicurigai pneumonia.

Lebih lanjut, Maxi meminta KKP untuk meningkatkan pengawasan terhadap orang (awak, personel, dan penumpang), alat angkut, barang bawaan, lingkungan, vektor, binatang



Rumah sakit di Beijing dan China wilayah utara tengah menghadapi lonjakan jumlah pasien anak-anak yang menderita penyakit pernafasan. (AFP)

pembawa penyakit di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas negara, terutama yang berasal dari negara terjangkau.

Dia meminta KKP dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di daerah untuk melakukan surveilans ketat dengan memantau peningkatan kasus di wilayah.

Maxi menyatakan hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab penyakit yang menyerang sistem pernafasan itu.

Namun, berdasarkan laporan epidemiologi, terjadi peningkatan kasus mycoplasma pneumoniae sebesar 40 persen. Mycoplasma merupakan penyakit penyebab umum infeksi pernapasan sebelum COVID-19.

Maxi mengatakan sejak Mei 2023, kasus rawat jalan dan rawat inap pada anak karena mycoplasma pneumoniae juga dilaporkan meningkat.

Kemudian pada Oktober 2023, angka kesakitan akibat respiratory syncytial virus (RSV), adenovirus, dan influenza juga sempat naik bulan lalu, meski saat ini telah turun. Oleh sebab itu, dia meminta agar selalu waspada dan menjaga kesehatan. "Meminta seluruh pihak untuk menggencarkan upaya promosi kesehatan berupa edukasi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait penyakit pneumonia," ucap dia.

Ditemukan di Belanda

Wabah serupa juga ditemukan di Belanda. Belanda jadi negara kedua yang melaporkan wabah serupa pekan ini. Institut Penelitian Layanan Kesehatan Belanda (NIVEL), sebuah lembaga penelitian di Utrecht, melaporkan bahwa 80 dari setiap 100.000 anak berusia antara 5 dan 14

tahun menderita pneumonia pada minggu lalu.

Melansir The Messenger, ini adalah wabah pneumonia terbesar yang pernah dicatat NIVEL dalam beberapa tahun terakhir. Pada puncak musim flu pada 2022 lalu, ketika kasus pneumonia paling umum terjadi, tercatat ada 60 kasus untuk setiap 100.000 anak dalam kelompok umur tersebut.

Sebuah kantor berita di Belanda mengatakan baik NIVEL maupun Institut Nasional untuk Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan, yang setara dengan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) di Belanda, tidak dapat memberikan penjelasan mengapa kasus pneumonia meningkat.

Sebelumnya, kasus pneumonia misterius di China juga mulai menimbulkan kekhawatiran. Laporan pertama muncul minggu lalu menyatakan bahwa rumah sakit anak-anak di Beijing dan provinsi Liaoning dipenuhi oleh anak-anak yang datang dengan penyakit pneumonia.

Pada konferensi pers pada 13 November, para pejabat Komisi Kesehatan Nasional China menyalahkan lonjakan tersebut sebagai akibat dari pencabutan pembatasan COVID-19, karena ini adalah musim flu pertama sejak negara tersebut melonggarkan kebijakan lockdown yang ketat.

Pejabat China mengatakan kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa tidak ada patogen baru yang terdeteksi dalam wabah tersebut, dan sebaliknya penyakit tersebut disebabkan oleh virus musiman seperti flu dan RSV, serta bakteri Mycoplasma pneumoniae. (wid,rtr;afp,rls/dya)

FAKTA PNEUMONIA MISTERIUS DI CHINA

1. Pertama Kali Ditemukan

Pada 21 November 2023, jaringan pemantau penyakit menular ProMED merangkum beberapa laporan dari media di Tiongkok terkait adanya penemuan pneumonia misterius yang disebut ada "pneumonia yang tidak terdiagnosis" (clusters of undiagnosed pneumonia) yang banyak menyerang anak-anak. Sehingga rumah sakit dan tempat lain kebanjiran anak-anak yang sakit. Hal ini lantas menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi pandemi baru dan membuat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO meminta informasi lebih lanjut dari Tiongkok melalui telekonferensi pada tanggal 22 November 2023.

2. Banyak Menyerang Anak-Anak

Dilaporkan pneumonia misterius yang terjadi di China ini lebih banyak menyerang anak-anak daripada orang dewasa. Banyak rumah sakit yang menerima pasien anak-anak yang terserang penyakit pneumonia misterius, yakni Beijing Children's Hospital dan Dalian Children's Hospital. Kedua rumah sakit tersebut sampai harus mengganti anak-anak yang terinfeksi di loby maupun lorong rumah sakit.

3. Penyebab Pneumonia Misterius

Menurut laporan dari WHO, penyebab utama dari pneumonia misterius yang menyerang anak-anak di China adalah Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae merupakan bakteri penyebab penyakit pernapasan. Penyakit karena bakteri ini muncul saat situasi musim panas bagi negara-negara yang memiliki empat musim.

4. Fatalitas Kasus Pneumonia Misterius

Risiko pneumonia pada pasien tidak parah. Bahkan sebagian besar bisa sembuh sendiri. Dengan catatan kondisi pasien bagus dan tidak mengalami gangguan imunitas atau daya tahan tubuh. Lebih lanjut, Dicky mengungkapkan bahwa fatalitas atau angka kematian tidak tinggi. Meski begitu, peningkatan pasien yang terinfeksi bakteri penyebab pneumonia ini masih meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan karena Mycoplasma pneumoniae yang diduga resisten terhadap antibiotik. Selain itu, dugaan lainnya adalah karena kondisi kesehatan anak secara umum serta daya tahan tubuhnya menurun.

5. Kasus Pneumonia di China Sudah Tidak Misterius

Pneumonia misterius di China kini sebetulnya sudah tidak misterius. Pasalnya, pemerintah di China sudah melaporkan secara resmi bahwa kasus ini bukan karena patogen baru. WHO belum menerapkan ini sebagai sesuatu yang harus dinyatakan sebagai kedaruratan, namun hal ini perlu diwaspadai.

Di Tengah Puja-puji KSAD Maruli, Ada Kecurigaan demi Kepentingan Jokowi



Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan terharu memeluk menantunya, Jenderal Maruli Simanjuntak yang resmi dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara Rabu (29/11/2023). (tangkap layar)

JAKARTA- Maruli Simanjuntak yang merupakan menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Rabu (29/11/2023). Ia menggantikan Jenderal Agus Subiyanto, yang sebelumnya telah dilantik sebagai Panglima TNI.

Anggota DPR RI pun memiliki pendapat berbeda-beda terkait keputusan Presiden tersebut. Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, mencurigai penunjukan Maruli KSAD bukan karena faktor prestasi saja. Diakuinya, Maruli memang layak menjabat KSAD bila melihat jejak kariernya di TNI AD hingga saat ini.

Namun, Hasanuddin juga melihat penunjukan Maruli lebih karena kedekatan Jokowi dengan Menteri Luhut. "Kalau dilihat dari bintang tiganya layak-layak saja, lah. [Tetapi] penunjukan Maruli itu kenapa? Apakah benar prestasi atau karena hanya karena kedekatan seperti kita ketahui Maruli menantunya Pak LBP [Luhut Binsar Pandjaitan]," kata Hasanuddin s.dikutip Rabu (29/11/2023).

Hasanuddin mencurigai penunjukan Maruli karena kedekatan Jokowi dengan Luhut yang sudah banyak membantu Jokowi selama menjadi presiden. "Kemudian, Pak LBP tangan kanannya Jokowi. Kalau yang lain enggak mungkin banyak bicara," ucap Hasanuddin.

Hasanuddin memahami penunjukan KSAD merupakan hak prerogatif presiden. Kendati demikian, dia khawatir penunjukan Maruli terkait dengan kepentingan Pemilu 2024, khususnya pada Pilpres 2024. Apalagi penunjukan Maruli dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi KSAD yang ditinggalkan Jenderal Agus Subiyanto yang hanya menjabat sekira satu pekan saja.

Hal ini lantaran Jokowi memilih Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI, lagi-lagi banyak yang menilai karena faktor kedekatan. Menurut Hasanuddin, apa yang dilakukan Jokowi terhadap pergantian pejabat utama TNI memang patut dicurigai menjelang Pemilu 2024. "Sekarang menjadi pertanyaan mengapa KSAD baru 1 Minggu, sudah diangkat menjadi Panglima TNI, pertanyaan besarnya apa prestasi beliau selama menjadi KSAD," kata Hasanuddin.

Berbeda dengan pendapat Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Dia menilai kemampuan, pengalaman, serta karakter Maruli Simanjuntak sudah sangat tepat untuk menempati posisi orang nomor satu di TNI Angkatan Darat (AD).

"Pak Maruli salah satu pati terbaik yang dimiliki TNI AD. Kecakapan, kemampuan serta pengalaman beliau yang banyak mendapat penghargaan brevet dari dalam dan luar negeri seperti Amerika Serikat, Inggris dan Thailand bukti bahwa beliau figur yang tepat untuk menjadi KSAD," kata Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/11/2023).

Meutya mengungkapkan, Letjen Maruli Simanjuntak merupakan pencetus program TNI AD Manunggal Air. Program manunggal air merupakan program penyediaan air bersih bagi warga, di tempat-tempat yang memang belum terakses air bersih, seperti di wilayah tandus, hingga daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T).

"Ada ratusan ribu penduduk dari Aceh sampai Merauke yang terbantu akses airnya dengan adanya program TNI AD Manunggal Air yang digagas oleh Pak Maruli," kata politisi dari Partai Golkar itu.

PR Besar soal Papua

Salah satu PR besar yang diingatkan oleh DPR kepada KSAD baru adalah terkait keamanan di

Papua. Usai dilantik, Maruli menuturkan, salah satu program yang akan dia kerjakan selama menjadi KSAD memang terkait dengan Papua.

"Intinya dengan perang gerilya adalah merebut hati rakyat. Jadi ini yang memang harus kita tingkatkan terus, khususnya di Papua," kata Maruli usai dilantik di Istana Negara, Rabu (29/11).

Maruli menjelaskan, ia sedang berusaha melobi Presiden Jokowi agar masalah di Papua tak hanya jadi tugas TNI saja. Menurutnya seluruh stakeholder juga harus dilibatkan. "Kebetulan [saya] sempat bicara-bicara dengan Bapak Presiden bahwa pekerjaan untuk khususnya di Papua itu bukan pekerjaan TNI AD saja atau TNI pada umumnya, itu semua stakeholder harus bisa bekerja di sana," ungkap Maruli.

"Jadi sebetulnya di dunia ini yang sudah membuat pembelajaran lawan gerilya, itu Indonesia termasuk hebat. Tapi hal-hal tersebut mungkin sedikit terlupakan dengan perkembangan zaman," lanjutnya.

Selain itu, Maruli mengungkapkan, ia juga berniat meningkatkan kualitas para personel TNI AD. Khususnya dengan membuka peluang sekolah ke luar negeri. "Di internal kita, di AD, saya pikir kualitas personel-personel itu mudah-mudahan ke depan kita punya banyak peluang untuk sekolah-sekolah di luar dan juga latihan-latihan, kita evaluasi," pungkasnya.

Terpisah, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) sekaligus pengamat militer Anton Aliabbas menilai dengan usia pensiun Maruli yang cukup panjang maka ada plus dan tantangannya. Plusnya, kata dia, Maruli punya cukup waktu untuk memimpin TNI AD serta punya kans sebagai pengganti Agus di tahun 2025.

"Tantangannya tentu saja adalah bagaimana pengelolaan pembinaan karir prajurit dimana senior yakni angkatan 1989-1991 masih cukup banyak," kata Anton Rabu (29/11/2023). "Potensi terjadinya bottle neck menjadi membesar jika tidak disikapi dengan perencanaan dan kebijakan yang baik," sambung dia.

Penunjukkan tersebut, menurutnya, jelas semakin membuka dugaan adanya ketidakpercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada birokrasi pemerintahan dalam situasi politik yang tidak menentu ini sehingga kemudian menempatkan semua orang kepercayaan pada jabatan kunci. Implikasinya, kata dia, adalah beban Maruli akan semakin berat untuk ikut menjaga netralitas TNI AD.

Mengingat Maruli lebih banyak pengalaman di pasukan tempur, lanjut dia, maka pekerjaan rumah utama yang harus ditangani adalah bagaimana meningkatkan kesiapan

(readiness) TNI AD. "Di tengah geopolitik yang tidak menentu, peningkatan kesiapan TNI AD menjadi krusial. Kecakapan dan pengalaman Maruli akan diuji dalam menyelesaikan pekerjaan rumah ini," sambung dia. (wid,rls,ist,tir/dya)

SEKILAS TENTANG MARULI SIMANJUNTAK

- Lahir di Bandung, Jawa barat pada 27 Februari 1970.
- Menikah dengan Paulina Pandjaitan, putri Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan
- Alumnus Akademi Militer (Akmlil) 1992
- Mempunyai spesialisasi dalam bidang infanteri.
- Posisi dan jabatan strategis di lingkungan TNI.
 - Pada 2002, Maruli mengemban amanah sebagai Komandan Detasemen Tempur Cakra.
 - Pada 2005 dia menjabat sebagai Perwira Bantuan Madya Operasi Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
 - Pada 2008, dia dipercaya untuk menjadi Komandan Batalyon 21 Grup 2 Kopassus serta Komandan Sekolah Komando Pusat Pendidikan Latihan Pasukan Khusus.
 - Pada 2010 Maruli dipromosikan menjadi Wakil Komandan Grup 1 Kopassus.
 - Pada 2014, dia terpilih menjadi Komandan Grup A Paspampres. Grup A Pasukan Pengamanan Presiden sendiri bertanggung jawab menjaga, mengawal, dan mengamankan presiden dan pasangan resminya (ibu negara atau suami presiden), dan keluarga intinya 24 jam sehari, tujuh hari sepekan. Di manapun para VIP (di Indonesia jamak dikategorikan sebagai VVIP) itu berada dan dalam keadaan atau kepentingan apapun, menjadi medan operasi mereka.
 - Pada 2016-2017 dia ditunjuk menjadi Komandan Korem 074/Warastratama dan Wadan Paspampres. Sejak 2018-2020 diangkat menjadi Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) IV/Diponegoro dan Danpaspampres.
 - Setelah menjadi Komandan Paspampres, kemudian menjadi Pangkostrad.

Prestasi Maruli

- - Kodam IX/Udayana dinilai sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan yang memiliki realisasi anggaran tertinggi berdasarkan penilaian Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali untuk Tahun Anggaran 2020. Kodam IX/Udayana saat itu masuk dalam Kategori Pagu Besar dan dinilai memiliki kinerja baik dalam tata kelola anggaran, termasuk di antaranya terkait penggunaan dan pelaporan dana.

- Dalam bidang olahraga, Maruli merupakan atlet judo nasional yang pernah berkompetisi sampai tingkat dunia terutama saat menjadi perwira pertama. Saat itu, dia menyabet dua gelar juara pada Kejuaraan Judo Militer ASEAN di Filipina untuk kelas 71 kilogram dan kelas bebas pada 1997. Ia pun didaulat sebagai pemain terbaik. Kemudian, dia pun dipercaya mengisi posisi sebagai ketua umum PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PB PJSI) periode 2021-2026 pada November 2021.



Warga Terdampak Tambang Batu Gamping Luruk DPRD Bojonegoro

SEJUMLAH warga Desa Sumuragung, terdampak aktivitas tambang batu gamping, Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro menyuarkan keluh kesah mereka kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro pada Rabu (29/11/2023).

Afandy, Koordinator Aksi Warga Sumuragung, menyampaikan bahwa tujuan dari aksi ini adalah untuk meminta bantuan DPRD Bojonegoro dalam proses klarifikasi dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Sumuragung terkait kompensasi yang diberikan oleh PT Wira Bhumi Sejati (WBS) kepada masyarakat yang terdampak oleh kegiatan tambang.

Selama enam tahun beroperasi, PT WBS diketahui telah memberikan uang sukarela kepada tim yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk disalurkan kepada masyarakat. Namun, menurut warga, mereka hanya menerima bantuan beras sekitar 25 hingga 35 kilogram.

"Selama operasi PT WBS, kami hanya mendapatkan bantuan beras sebanyak itu," ungkap Kacung Kristianto, yang akrab disapa Kacung.

Informasi yang diterima oleh warga menyebutkan bahwa PT WBS telah menyalurkan bantuan sukarela sebesar Rp7 miliar kepada tim yang dibentuk oleh pemdes di luar struktur organisasi pemerintahan desa. Namun, usaha warga untuk mendapatkan klarifikasi terkait aliran dana tersebut ke Pemdes Sumuragung mengalami jalan buntu.

"Kami tidak ingin terlibat dalam demonstrasi yang bisa berujung pada kekacauan. Kami juga tidak memiliki wewenang untuk menekan Pemdes, itulah sebabnya kami datang ke sini, ke



Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro yang terdampak penambangan batu gamping mendatangi DPRD Bojonegoro.

DPRD Bojonegoro," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, bertemu dengan aksi protes warga Desa Sumuragung. Sukur menyatakan bahwa aduan terkait penyaluran kompensasi kepada masyarakat terdampak oleh aktivitas tambang batu gamping tersebut telah masuk sebulan yang lalu. DPRD telah mengundang pemdes untuk klarifikasi.

"Pemdes dan stafnya yang hadir saat dipanggil oleh DPRD tidak membawa data rinci terkait penyaluran kompensasi tersebut," terangnya.

Politisi dari Partai Demokrat tersebut menambahkan bahwa hingga saat ini, DPRD belum menerima data rinci hasil musyawarah desa (musdes) terkait penyaluran kompensasi seperti yang diungkapkan oleh pemdes. "Kami sudah meminta, namun belum menerima informasi tersebut," tambahnya.

Sebelumnya, penyaluran

kompensasi dari aktivitas tambang yang dilakukan oleh PT WBS juga telah ditangani oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Inspektorat Bojonegoro memberikan tiga rekomendasi kepada Pemerintah Desa Sumuragung terkait penyaluran kompensasi ini. Rekomendasi tersebut antara lain bahwa panitia tim pengelola harus membuat laporan kepada pemberi bantuan, dana yang tersisa harus diserahkan kepada pemerintah desa dan dimasukkan ke dalam APBDes, serta bantuan dari pihak lain ke depan harus langsung diserahkan kepada pemdes.

Selain itu, diduga uang yang mengalir dari perusahaan tambang batu gamping itu salah dalam pengelolaannya. Sehingga tidak masuk dalam Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal itu terkuak setelah muncul laporan warga ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro terkait pengelolaan uang sumbangan dari PT Wira Bhumi Sejati sebagai perusahaan tambang yang

beroperasi di Desa Sumuragung

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro Badrut Tamam mengatakan, setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, ternyata kasus tersebut tidak melibatkan uang negara. Sehingga pihaknya merekomendasikan ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan dari sumbangan perusahaan tambang yang beroperasi di sana," ujarnya beberapa waktu lalu dikutip dari beritajatim.com

Menurutnya, sesuai Undang-undang Desa, pemerintah desa sebenarnya boleh menerima sumbangan dari pihak ketiga. Sumbangan tersebut nantinya akan menjadi pendapatan lain yang sah dan masuk sebagai PADes.

"Seharusnya desa membuat tim sendiri untuk mengelola uang tersebut dan masuk Pendapatan Asli Desa," pungkasnya.

Sejauh ini, uang tersebut dikelola sendiri oleh tim yang tidak masuk dalam struktur pemerintahan desa. Sehingga dalam pengelolaannya, uang itu tidak dimasukkan ke dalam pendapatan desa.

Atas kejadian tersebut, pihak Inspektorat Bojonegoro memberikan tiga rekomendasi kepada Pemdes Sumuragung.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Teguh Prihandono mengatakan, dalam kasus pengelolaan keuangan yang bersumber dari sumbangan PT Wira Bhumi Sejati, pihaknya mengaku telah memberikan tiga rekomendasi kepada Pemdes Sumuragung. (lut/dya)

Sebanyak 243 Kotak Suara Logistik Pemilu 2024 di Jember Rusak

JEMBER - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember menemukan sebanyak 243 kotak suara yang rusak dari total 38.592 kotak suara yang diterima setelah disortir oleh petugas yang melakukan pengecekan logistik Pemilu 2024 di gudang KPU Kabupaten Jember.

"Ada delapan macam logistik Pemilu 2024 yang sudah kami terima dan setelah dilakukan pengecekan oleh pekerja tercatat 243 kotak suara rusak dan kekurangan 10 bilik suara," kata Ketua KPU Jember Muhammad Syai'in, Rabu (29/11/2023).

Menurutnya jumlah kotak suara yang dibutuhkan sebanyak 38.592 unit dan jumlah yang sudah diterima sesuai dengan kebutuhan, namun setelah dicek oleh petugas terdapat 243 kotak suara yang rusak.

"Kami sudah mengirimkan surat untuk meminta pengganti kotak suara

yang rusak sesuai dengan kebutuhan kepada KPU Jatim, namun hingga saat ini masih dalam proses pengiriman dan belum kami terima," tuturnya.

Kemudian untuk bilik suara total kebutuhannya mencapai 30.824 unit, namun total yang diterima sebanyak 30.814 bilik suara, sehingga masih ada kekurangan sebanyak 10 unit dan pihak KPU sudah menyampaikan hal tersebut untuk segera ditambah sesuai kebutuhan.

"Logistik lainnya yang sudah kami terima yakni 15.412 tinta, 740.370 segel, 200.356 segel plastik, 285.122 tanda pengenal, sebanyak 77.060 stiker label identitas, serta bantalan dan alat coblos sebanyak 30.936 unit," paparnya.

Ia mengatakan seluruh logistik Pemilu 2024 yang sudah diterima tersebut dipastikan tersimpan dengan aman di gudang KPU Jember yang

berada di Jalan Imam Bonjol tersebut, karena dijaga ketat oleh aparat kepolisian setempat.

Sementara Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Kepolisian Resor Jember M. Toha mengatakan Polri melaksanakan penjagaan ketat untuk mengamankan logistik Pemilu 2024 yang tersimpan di gudang KPU setempat.

"Logistik pemilu tersebut dijaga ketat selama 24 jam penuh setiap hari dan dilakukan secara bergantian (shift) oleh personel Polres Jember, sehingga dipastikan aman," ucapnya.

Ia mengatakan sebanyak sembilan petugas kepolisian yang bertugas



Anggota Polres Jember menjaga dan melakukan pengawasan logistik pemilu di gudang KPU yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Jember. ANTARA/HO-Polres Jember

setiap harinya untuk melakukan pengamanan dan pengawasan di gudang KPU Jember dengan rincian empat petugas sesi satu dan empat petugas sesi dua, beserta komandan pengendali. (lut/dya)

ASN Harus Netral dalam Pemilu 2024

SURABAYA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terus meminta pada ASN supaya netral dalam Pemilu 2024. Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Bangkalan memberikan sanksi teguran kepada empat orang aparat sipil negara di lingkungan Pemkab setempat karena memberikan dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres peserta Pemilu 2024 melalui media sosial.

"Sanksi yang kami berikan adalah sanksi teguran dengan mengingatkan mereka agar tidak mengulangi perbuatannya," kata Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain kepada awak media di Bangkalan, Rabu (29/11/2023).

Ia menjelaskan sesuai dengan ketentuan, ASN harus bersikap netral dan tidak boleh menunjukkan dukungan kepada salah satu pasangan calon, baik calon presiden dan wakil presiden maupun calon anggota legislatif.

Sikap netral abdi negara ini harus dilakukan dalam semua hal, termasuk di media sosial, seperti facebook, X (twitter), dan instagram.

Ia menjelaskan bahwa tim pemantau media sosial Bawaslu Bangkalan menemukan ada empat orang ASN yang aktif memberikan dukungan dengan mengunggah salah satu pasangan capres-cawapres dan caleg. "Atas temuan tersebut, kami langsung meneruskan," katanya.

Selanjutnya, Mustain mengimbau seluruh ASN di Bangkalan agar tidak terlibat aktif dalam pemilu dengan mendukung calon tertentu.

Mengenai temuan Bawaslu soal adanya ASN yang mendukung calon tertentu, Pejabat Bupati Bangkalan Arief M. Edie mengatakan agar hal serupa tidak akan terulang lagi dan dilakukan ASN lainnya.

"Jangankan mendukung, menyukai (like) saja di medsos pada calon tertentu dilarang. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga netralitas ASN ini agar pemilu bisa berlangsung sesuai harapan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Sementara itu, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko mengingatkan kembali jajarannya di lingkup ASN Pemkab Ponorogo, untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Sugiri Sancoko, saat memimpin upacara peringatan HUT ke-52 Korpri di halaman Pendopo Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Rabu (29/11/2023).

"Mendekati pemilu ini, saya mengimbau ASN tetap netral, menjaga harkat dan martabatnya," kata Bupati yang akrab disapa Kang Giri itu dalam sambutannya pada HUT ke-52 Korpri.

Sebagai keluarga korps pegawai negeri, lanjut dia, ASN tidak boleh berpihak ataupun terafiliasi pada parpol maupun capres tertentu. ASN yang tergabung dalam lembaga Korpri sudah selayaknya menjadi suri teladan

dan melayani rakyat.

Apalagi dengan tema tahun ini yakni 'Korpri-kan Indonesia' maka sudah seharusnya anggota Korpri untuk menjadi teladan yang baik dimata masyarakat. "Dimata masyarakat Korpri harus menjadi teladan yang baik," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Sugiri mengajak para ASN untuk berdonasi dengan menyisihkan rezekinya untuk membantu rakyat Palestina yang saat ini terdampak peperangan. Sugiri pun memberi contoh awal dengan melelang dua unit motor Vespa kesayangannya, yang seluruh hasil penjualannya akan didonasikan ke Palestina.

"Dua Vespa saya dilelang untuk donasi Palestina, 100 persen disumbangkan, Pak Sekda jam tangan kesayangannya juga dilelang," katanya.

Selain itu, Kang Giri juga mengajak para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk siap menghadapi musim hujan, dan melakukan mitigasi bencana serta siap menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. "Ponorogo ini minimarket bencana, jadi mitigasi sejak dini itu penting untuk menciptakan ketangguhan bencana," katanya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya netralitas dan profesionalitas ASN dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2024. Utamanya, kata Gubernur Khofifah, karena Indonesia akan menggelar pesta demokrasi dengan berlangsungnya pemilihan presiden/wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, maupun wali kota/wakil wali kota.

"Pesta Demokrasi akan selalu disandingkan dengan netralitas ASN. Maka netralitas termasuk profesionalitas inilah yang ingin saya tekankan kepada seluruh anggota Korpri di Jawa Timur," kata Gubernur Khofifah saat memimpin Upacara Peringatan HUT ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2023, di halaman Gedung Negara Graha di Surabaya, Rabu (29/11/2023).



(Ilustrasi) Bawaslu meminta pada ASN supaya netral dalam Pemilu 2024.

Khofifah mengatakan Korpri memiliki peran penting dan strategis dalam membangun Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga merupakan salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa.

"Saya minta kepada seluruh pengurus Korpri untuk terus menjaga anggotanya. Agar tetap tegak lurus kepada Negara, Pancasila, dan UUD 1945. Secara khusus, saya juga meminta keluarga besar Korpri untuk terus-menerus membentengi anggotanya dari intoleransi dan radikalisme," jelasnya.

Sementara itu, Sekdaprov Jatim yang juga Ketua Dewan Pengurus Korpri Jatim Adhy Karyono mengatakan Korpri sebagai wadah ASN bertekad untuk menjadi birokrat administrator yang harus netral atau tidak boleh berpihak.

"Tapi semua mendukung kesuksesan dari pesta demokrasi politik," katanya. Adhy mengatakan bentuk pengawasannya adalah kode etik dan satker sebagai pengawas. "Kami punya tim yang bisa mengontrol ASN di Jatim," lanjutnya.

Menurutnya pihaknya terus melakukan sosialisasi terhadap ASN untuk tetap netral. "Kalau masih ada tentu akan ada teguran hingga sanksi," tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jatim Mohammad Ali Kuncoro mengaku sepakat kalau ASN

harus netral. Tapi ASN juga harus bisa memberikan contoh dan mencerdaskan masyarakat agar selalu bisa memilih dengan baik.

Sementara itu, Bawaslu RI 21 September 2023 lalu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan isu netralitas ASN. Di tingkat provinsi, netralitas ASN jadi isu paling rawan, yakni di 22 provinsi. Sementara itu, di tingkat kabupaten kota, isu netralitas ASN menjadi yang paling rawan di 347 kabupaten kota.

Sepuluh provinsi dinilai menjadi kawasan paling rawan dalam isu ini. Sepuluh provinsi itu meliputi Maluku Utara, Sulawesi Utara, Banten, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Gorontalo, dan Lampung.

Dengan demikian, wajar-wajar saja ada provinsi satu ditemukan adanya ASN yang melanggar. Sebab, Netralisasi ini menjadi sebuah tantangan yang kemudian mencoba mendorong agar ASN berdiri pada posisi netral karena semestinya undang-undangnya jelas menyebutkan itu tugas harus netral.

Hasil temuan ASN yang tidak netral ini juga menjadi bahan evaluasi bersama. Bukan hanya dibebankan kepada Bawaslu, namun dari pihak pemerintah daerah, Polri-TNI, hingga instansi terkait untuk sama-sama menjaga netral dalam Pemilu. (lut/dya)



"Pesta Demokrasi akan selalu disandingkan dengan netralitas ASN. Maka netralitas termasuk profesionalitas inilah yang ingin saya tekankan kepada seluruh anggota Korpri di Jawa Timur,"

Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur

Pembangunan Parkir Vertikal Gajayana Berkapasitas 1.000 Motor, Ditargetkan Selesai Pertengahan Desember



Proses pembangunan lahan parkir vertikal di kawasan Stadion Gajayana Kota Malang, Rabu (29/11/2023). (Santi/Lenteratoday)

MALANG - Pembangunan parkir vertikal di kawasan Stadion Gajayana Kota Malang, ditargetkan rampung pada pertengahan Desember 2023. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)

Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan parkir vertikal 3 tingkat tersebut, dimungkinkan menampung 1.000 kendaraan roda 2 setiap harinya.

Pria yang akrab dengan sapaan Jaya ini berharap, dengan selesainya parkir vertikal seluas 50 x 35 meter tersebut. Kedepannya mampu meminimalisir masalah parkir liar di Kota Malang serta mendongkrak potensi pendapatan dari retribusi parkir di wilayahnya.

"Inshaallah ini tinggal menaikkan kontruksi bajanya. Ya, palingan maksimal 20 hari selesai ini. Ini parkir bertingkat, ada 3 tingkat dengan luas bangunan 50 x 35 meter. Anggarannya Rp 4,3 miliar," ujar Jaya, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (29/11/2023).

Dishub menargetkan parkir vertikal ini dapat menampung hingga 1000 kendaraan roda dua dengan sistem keluar-masuk. Namun, dalam skenario di mana sebagian besar kendaraan memilih untuk menetap lebih lama, maka kapasitasnya diperkirakan hanya

sekitar 400-500 kendaraan, setiap harinya.

Lebih lanjut, meskipun progres pembangunan sedikit tertunda karena menunggu proses pengeringan cor. Jaya optimistis bahwa pembangunan akan selesai dalam waktu kurang dari 20 hari, dan diperkirakan rampung pada 15 Desember 2023 mendatang.

"Kalau ini kita sudah pasang besi-besi kerangkanya, nah itu baru cepat. Gak sampai 20 hari sudah selesai nanti. Ini kan kontruksinya baja, bukan beton, jadi insyaallah cepat," jelasnya.

Di sisi lain, dalam menegaskan komitmennya untuk memberikan kemudahan akses parkir di masyarakat. Jaya menyampaikan bahwa pihaknya telah berencana untuk melakukan pembangunan parkir vertikal di lahan Ex DLH, Jalan Majapahit, Kecamatan Klojen. Namun menurutnya, pembangunan tersebut akan terealisasi di tahun 2024 mendatang.

"Konsepnya sama, parkir vertikal 3 tingkat juga. Terlebih di situ kan nanti harapannya bisa menampung kendaraan pengunjung Kayutangan Heritage," tukasnya. (Santi/Dya)

Warga Kota Batu Makin Mudah Bayar Pajak dengan QRIS

BATU - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu memper-kenalkan inovasi baru dalam pembayaran pajak non-tunai. Warga kini bisa memanfaatkan teknologi Quick Response code Indonesian Standard (QRIS) untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Daerah Lainnya (PDL).

Kepala Bapenda Kota Batu, Dyah Lies Tina Purwaty, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengajak masyarakat Kota Batu, agar lebih terbiasa dengan metode pembayaran pajak secara non-tunai. Selain itu, tentunya juga bertujuan untuk mengencarkan digitalisasi pada masyarakat.

"Iya, jadi dengan program seperti ini, harapannya masyarakat bisa lebih familiar dengan pembayaran pajak non tunai," ujar Dyah, ditemui saat meninjau kegiatan tersebut di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Rabu (29/11/2023).

Kegiatan kali ini, lanjut Dyah, untuk sementara masih berfokus pada



Warga nampak memanfaatkan program Bayar Pajak melalui QRIS dari Bapenda Kota Batu, Rabu (29/11/2023). (Santi/Lenteratoday)

pembayaran PBB dan PDL seperti pajak hotel, restoran, dan pajak hiburan. Pihaknya menegaskan bahwa untuk pembayaran pajak kendaraan, implementasi program ini baru akan dilakukan pada tahun mendatang, mengingat saat ini masih menjadi kewenangan provinsi.

Lebih lanjut dalam upaya sosialisasi. Dyah mengaku bahwa Bapenda telah melakukan langkah-

langkah bertahap, di antaranya dengan mendampingi masyarakat dalam menggunakan QRIS di Balai Kota Among Tani saat ini. Dyah juga merencanakan untuk menyebarkan layanan ini ke kecamatan, kelurahan, dan desa, serta melakukan sosialisasi intensif melalui program PBB keliling menggunakan mobil.

"Jadi memang disarankan mulai sekarang, bertahap, wajib pajak (wp)

itu membayar dengan non tunai. Arahnya kan ke digitalisasi. Kita di sini hari ini saja, kita layani sampai jam 4. Semua bank bisa untuk membayar yang penting punya saldo dan punya m-banking," paparnya.

Sementara itu, Deshinta Widi, salah seorang warga Beji, menyambut positif program ini. "Menurut saya, ini memudahkan sekali. Soalnya kalau dengan cara konvensional kadang cukup menyita waktu. Dengan pembayaran melalui QRIS, nantinya kita bisa bayar di manapun dan kapanpun," ungkapnya.

Desi berharap agar Pemkot Batu dalam lebih mensosialisasikan program ini kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang belum sepenuhnya terbiasa dengan teknologi.

"Saya tahu informasi ini dari instagram, karena saya cukup mengikuti update pemberitahuan dari instagram untuk tahu info-info layanan seperti ini. Harapannya semoga hal ini bisa disosialisasikan lebih lanjut ke masyarakat luas. Terutama masyarakat yang kurang bisa mengikuti penggunaan teknologi seperti ini," pungkasnya. (Santi/dya)

BELINDA CHRISTINA SIANTO

Juara Masterchef Indonesia Season 11

BELINDA berhasil menyabet gelar juara Masterchef Season 11, dengan mengalahkan Kiki.

Pada episode terakhir pada Minggu (26/11/2023), Belinda menjadi juara satu, semetara Kiki menjadi runner up.

Kemenangan Belinda ini kemudian menjadi trending topik lantaran Masterchef dinilai tidak objektif.

Perempuan yang memiliki nama asli Belinda Christina Sianto sejak awal kompetisi sudah menjadi salah satu kontestan yang mencuri perhatian.

Sebab, dia mengawali kariernya di dunia tata boga dengan menempuh pendidikan di Le Cordon Bleu, New Zealand.

Banyak penggemar kecewa dan menuduh Masterchef tidak adil karena Belinda merupakan lulusan Le Cordon Bleu New Zealand.

Nah seperti yang diketahui, Belinda Christina Sianto merupakan kontestan unggulan yang pernah menempuh pendidikan di Le Cordon Bleu, New Zealand.

Kemudian ia mendapat gelar Diploma De Cuisine pada 2019. Belinda akhirnya ikut Masterchef dengan cita-cita ingin mendirikan restorannya sendiri.

Belinda berasal dari keluarga agamis, di mana ayahnya adalah seorang pendeta bernama Samuel Sianto.

Melalui akun Instagram pribadinya, ayah Belinda memperkenalkan dirinya sebagai Pdt. Samuel Sianto dari Gereja Bethany Yestoya, Malang, Jawa Timur.

Sebelum masuk ke babak grand-final, Belinda mendapat tiket masuk dari Chef Juna dan Chef Arnold.

Belinda pun menjadi salah satu peserta yang kompetitif hingga bisa mengalahkan Rizkisyah Putra Singarimbun alias Kiki.

Namun kemenangannya itu menjadi kontroversi hingga trending

topik di media sosial X pada Senin (27/11/2023).

Juri Masterchef dituding tidak adil saat memberikan poin kepada Belinda dan Kiki, di mana keduanya hanya memiliki selisih 10 angka.

Belinda keluar sebagai juara dengan total poin 1867. Namun yang menjadi masalah adalah saat Belinda disinyalir tak memotong daging lamb atau domba di babak final.

Kontroversi lainnya yakni saat penggemar menilai Belinda mendapat poin tambahan karena dibantu Kiki menyelesaikan masakan.

Di akun Instagram pribadinya, @belinda.mci11, Belinda berterima kasih dan sempat meminta maaf apabila telah mengecewakan banyak orang.

Namun ia dengan tegas me-ngatakan bahwa apa yang dicapainya saat ini adalah karena hasil usaha terbaiknya.

"Aku juga bener-bener terima kasih ke semuanya, maaf aku sering mengecewakan banyak orang. Banyak yang bilang I didn't give my best performance and even gak layak untuk masuk ke grand final atau bahkan untuk ada di gallery but the truth is, banyak orang gak tau kalau the pressure itu gede banget, especially for me yang gak pernah masak di depan camera dan jujur aja udah berkali-kali aku mau nyerah tapi I didn't, and trust me aku udah selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Bangun subuh pulang malem, kadang tidur juga gak cukup but thank God selama aku karantina gak pernah sekalipun sakit," tulisnya pada Minggu (26/11/2023). (Bisnis)



SKRINING OTAK PENTING UNTUK CEGAH ANEURISMA

DOKTER spesialis bedah saraf dari Kelompok Staf Medis Bedah Saraf Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo dr. Ande Fachniadin, Sp.BS, mengatakan melakukan skrining otak secara rutin sebagai langkah pencegahan terhadap aneurisma adalah penting.

"Jika terdapat pembuluh darah yang sudah berbentuk balon, sebaiknya ditutup agar tidak terjadi pecah di masa mendatang," ujar Ande dalam diskusi interaktif di Jakarta.

Aneurisma, penggelembungan pembuluh darah pada otak, dapat dialami oleh siapa pun, terutama oleh mereka yang memiliki riwayat keluarga terkait masalah tersebut. Menurut Ande, bahkan orang berusia 40-an saat ini dapat menjadi penderita aneurisma.

Meskipun tidak sepopuler penyakit jantung dan stroke, Ande mengingatkan bahwa aneurisma dapat berakibat fatal dan seringkali tidak menunjukkan gejala. Oleh karena itu, pengecekan otak secara rutin dianggap sangat penting.

Ande, yang menyelesaikan pendidikan spesialis bedah saraf di Universitas Indonesia, menilai ketika seseorang berusia 30 tahun, dia sangat perlu menaruh perhatian terhadap kesehatan. Skrining besar, misalnya dengan metode pencitraan magnetik resonance imaging (MRI) pada kepala bisa dilakukan ketika berusia 30 tahun dan diulang pada usia 40 tahun.

Skrining otak dapat menggunakan pemindaian tomografi terkomputasi (CT scan) untuk gambar dua dimensi otak dan pembuluh darah yang lebih jelas.

Pilihan lainnya adalah angiografi menggunakan kateter yang dimasukkan lewat pembuluh darah di pangkal paha dan diarahkan ke otak. Cairan khusus disuntikkan ke pembuluh darah otak untuk mendeteksi lokasi dan ukuran aneurisma.

"Tindakan lebih awal lebih baik," kata Ande.

Menurut Ande, metode skrining kepala melibatkan pengecekan kondisi pembuluh darah, yang tidak hanya dapat mendeteksi aneurisma, tetapi, juga menunjukkan adanya flek, sumbatan, dan pembuluh darah yang berbentuk balon.

Ande juga menekankan pentingnya mengetahui gejala-gejala pecahnya pembuluh darah dan mendorong masyarakat untuk membiasakan diri melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Sang dokter juga mengingatkan masyarakat bahwa penting untuk

mengetahui lokasi rumah sakit di sekitar tempat tinggal agar ketika dalam situasi darurat, langkah-langkah yang diperlukan dapat segera diambil.

Faktor risiko

Aneurisma yakni kondisi dinding pembuluh darah otak melebar atau menonjol (ballooning) umumnya tak bergejala, namun bisa berujung fatal seperti perdarahan dan kerusakan otak bila pembuluh darah pecah, sehingga brain check up atau skrining otak rutin menjadi anjuran dokter.

Kondisi akibat lemahnya dinding pembuluh darah tersebut, diperkirakan dialami setiap 1 orang setiap 18 menit dan sekitar 500.000 orang meninggal setiap tahunnya karena masalah ini.

Sejumlah faktor dapat menyebabkan kelemahan pada pembuluh darah dan meningkatkan risiko aneurisma otak atau pecahnya aneurisma yang

bisa menyerang orang berusia muda.

Faktor risiko ini, seperti dikutip dari Mayo Clinic antara lain usia yang lebih tua, kebiasaan merokok, tekanan darah tinggi (hipertensi), penyalahgunaan narkoba dan kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol berat. Beberapa jenis aneurisma juga dapat terjadi setelah cedera kepala (membedah aneurisma) atau dari infeksi darah tertentu (aneurisma mikotik).

Di sisi lain, pola makan tak sehat yakni tinggi kolesterol, kurang beristirahat dan obesitas juga menjadi faktor risiko masalah pembuluh darah ini.

Kebanyakan aneurisma biasanya tak bergejala kecuali aneurisma pecah. Namun, aneurisma yang tidak pecah masih dapat menghalangi sirkulasi ke jaringan lain, membentuk gumpalan darah yang dapat menghalangi pembuluh darah yang lebih kecil.

Kondisi ini dikenal sebagai

tromboemboli yang bisa berujung stroke iskemik atau komplikasi serius lainnya (Ant)



BAGAIMANA CARA MENCEGAH ANEURISMA OTAK?

- Berhenti merokok
- Tidak menyalahgunakan obat-obatan
- Segera menangani tekanan darah tinggi
- Membatasi konsumsi alkohol dan kafein
- Makan makanan sehat dan mengurangi konsumsi garam
- Berolahraga secara teratur
- Menjaga berat badan



HOAKS! NYAMUK WOLBACHIA SEBABKAN RADANG OTAK DAN PANDEMI BARU

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menyebar nyamuk Wolbachia untuk menekan penyakit demam berdarah dengue (DBD) di lima kota Indonesia yakni Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Bontang, dan Kupang.

Hal itu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor 1341 tentang Penyelenggaraan Pilot Project Implementasi Wolbachia sebagai Inovasi Penanggulangan Dengue.

Namun, beberapa masyarakat masih menolak penyebaran nyamuk Wolbachia di daerahnya. Salah satunya, sebuah unggahan Facebook menarasikan bahwa nyamuk Wolbachia berbahaya, terutama pada anak-anak dan juga lansia karena bisa menyebabkan radang otak.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

"Ada yang tahu nyamuk wolbachia? Kalo belum tahu bahaya, bisa menyebabkan radang otak pada anak dan lansia, bukan nyamuk asli tapi sengaja di sebar untuk ya sudahlah, cobak Cari di youtob"

Namun, benarkah nyamuk Wolbachia bisa menyebabkan radang otak pada anak-anak dan lansia?

Penjelasan:

Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa tidak ada rekayasa genetik dalam teknologi Wolbachia. Wolbachia sendiri adalah bakteri yang hanya dapat hidup di dalam tubuh serangga, termasuk nyamuk.

Wolbachia tidak dapat bertahan hidup di luar sel tubuh serangga dan tidak bisa mereplikasi diri tanpa bantuan serangga inangnya. Ini merupakan sifat alami dari bakteri wolbachia. Wolbachia sendiri telah ditemukan di dalam tubuh nyamuk aedes albopictus secara alami.



"Bakteri Wolbachia maupun nyamuk sebagai inangnya bukanlah organisme hasil dari modifikasi genetik yang dilakukan di laboratorium. Secara materi genetik baik dari nyamuk maupun bakteri wolbachia yang digunakan, identik dengan organisme yang ditemukan di alam" ungkap Peneliti Universitas Gadjah Mada Prof dr Adi Utarini MSc MPH PhD, dilansir dari laman Kemenkes.

Di Indonesia sendiri, teknologi Wolbachia yang digunakan, diimplementasikan dengan metode "penggantian", dimana baik nyamuk jantan dan nyamuk betina wolbachia dilepaskan ke populasi alami.

Tujuannya agar nyamuk betina kawin dengan nyamuk setempat dan menghasilkan anak-anak nyamuk yang mengandung Wolbachia. Pada akhirnya, hampir seluruh nyamuk di populasi alami akan memiliki Wolbachia.

Wolbachia berperan dalam

memblok replikasi virus dengue di dalam tubuh nyamuk. Akibatnya nyamuk yang mengandung wolbachia, tidak mampu lagi untuk menularkan virus dengue ketika nyamuk tersebut menghisap darah orang yang terinfeksi virus dengue.

Mengingat bahwa wolbachia terdapat dalam telur nyamuk, maka bakteri ini akan diturunkan dari satu generasi nyamuk ke generasi berikutnya. Akibatnya, dampak perlindungan wolbachia terhadap penularan dengue bersifat berkelanjutan (sustainable).

Terkait Wolbachia menyebabkan radang otak, Peneliti dari Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Prof Dr Adi Utarini MSc MPH PhD, mengatakan tidak ada kaitan antara radang otak Japanese Encephalitis dengan teknologi Wolbachia.

Pandemi kedua

Sebuah unggahan Facebook menarasikan bahwa nyamuk Wolbachia ini merupakan buatan individu elite global untuk menguasai dunia.

Dalam unggahan tersebut juga dijelaskan kalau nyamuk Wolbachia ini lebih berbahaya dibanding pandemi COVID-19.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyebut Wolbachia tidak menginfeksi manusia, tidak terjadi transmisi horizontal terhadap spesies lain dan tidak mencemari lingkungan biotik dan abiotik. Peningkatan jumlah nyamuk Aedes Aegypti di area pelepasan hanya terjadi saat periode pelepasan.

"Wolbachia tidak menimbulkan penyakit baru yang berbahaya bagi kesehatan, sudah ada penelitian dan kajian risiko," kata Nadia.

Dokter spesialis penyakit dalam dr RA Adaninggar Primadia Nariswari atau biasa disebut dr Ningz memastikan bahwa penyebaran nyamuk Wolbachia bukan merupakan uji coba yang belum terbukti, karena uji coba dan penelitian tentang bakteri ini telah dilakukan sejak 2011. Dia menyebutkan terdapat sejumlah negara endemis DBD seperti Brazil, Australia, Vietnam, Meksiko, dan Sri Lanka yang juga menerapkan hal yang sama.

Kemenkes mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai sejumlah berita hoaks terkait Wolbachia yang banyak beredar di dunia maya. Kemenkes juga akan terus melakukan upaya dalam memberikan informasi yang baik, tidak hanya dari Kemenkes, namun juga sejumlah pakar dan peneliti.

Dengan demikian, klaim sebaran nyamuk Wolbachia akan menjadi pandemi kedua dan sebabkan depopulasi merupakan pernyataan tidak berdasar (Ant)





FESYEN UNTUK SI KECIL HADAPI MUSIM HUJAN

SESUAI dengan prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Indonesia mulai menghadapi musim hujan di November 2023 dan memasuki puncaknya di Januari serta Februari 2024.

Bagi keluarga yang memiliki anak, tentunya menyiapkan pakaian yang tepat untuk buah hati menjadi penting mengingat musim penghujan memiliki karakteristik cuaca yang berbeda dengan musim kemarau.

Dalam siaran persnya, Minggu, Tokopedia membagikan beberapa ide fesyen yang tepat untuk si kecil agar sesuai dengan kebutuhannya menghadapi musim hujan.

Jaket anti dingin untuk jauhkan masuk angin

Saat musim hujan salah satu yang berubah ialah suhu lingkungan yang cenderung lebih dingin.

Agar anak tidak kedinginan saat beraktivitas di luar ruang, maka orang tua disarankan mempersiapkan jaket sebagai penghangat tubuh anak.

Pilih pakaian bermaterial nyaman agar kulit anak tetap aman

Saat musim hujan, anak akan merasa hangat ketika memakai baju berlapis, namun kulit anak harus tetap bisa bernapas lega walau memakai jaket atau baju luaran lainnya.

Agar anak terhindar dari biang keringat, memilih kaos katun dapat menjadi solusi agar keringat dapat tetap terserap dengan baik.

Baju gelap untuk kegiatan luar ruang

Musim hujan identik dengan

genangan air. Saat beraktivitas di luar, anak bisa saja menginjak genangan air tersebut dan menyebabkan baju mereka kotor.

Maka sebaiknya anak menggunakan baju dengan warna gelap agar noda yang bisa mengotori baju tidak terlalu terlihat.

Beri kehangatan ekstra dengan topi pelindung kepala

Selain luaran, topi atau beanie juga bisa menjadi pilihan orang tua untuk memberikan kehangatan ekstra pada anak saat musim hujan.

Di samping memberi kehangatan, topi juga

dapat menambah sentuhan manis untuk anak dalam berpakaian.

Senjatai anak dengan payung dan jas hujan

Hujan bisa datang kapan saja, maka sebaiknya orang tua menyediakan jas hujan atau payung di dalam tas sekolah anak.

Dengan demikian ketika hujan datang, anak sudah siap menghadapinya dengan perbekalan yang sudah disiapkan oleh ayah dan bunda.

Fesyen anak yang menjadi bagian dari salah satu produk kategori terlaris Tokopedia di 2023, menjadi dasar Tokopedia untuk menghadirkan kampanye bertajuk "Kids Fashion Festival".

Bersama dengan sederet jenama fesyen anak, kampanye itu hadir memberikan akses kepada orang tua untuk membeli baju anak dengan harga terjangkau hingga 7 Desember 2023.



"Kampanye ini menawarkan produk fashion anak dengan harga affordable. Ada juga flash sale setiap hari hingga 80 persen dan promo eksklusif dari brand fashion anak terkurasi," kata Head of Category Development Tokopedia Aldhy Darmayo.

Lewat kampanye ini diharapkan orang tua bisa mendapatkan produk fesyen yang tepat dan dibutuhkan untuk sang buah hati termasuk saat menghadapi musim penghujan (Ant)



Darurat Pemilu 2024 ... (dari Hal 1)

DIREKTORAT Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mengusut adanya dugaan kebocoran data pemilih di situs web Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data pemilih yang diduga bocor itu dijual oleh peretas melalui situs Breach Forums dengan harga Rp 1,1 miliar.

"Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar saat dikonfirmasi, Rabu (29/11/2023).

Adi Vivid mengungkapkan, saat ini Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sedang menyelidiki soal dugaan kebocoran itu. Lebih lanjut, pihak Bareskrim juga melakukan koordinasi dengan KPU. "Saat ini Tim CSIRT sedang koordinasi langsung dengan KPU untuk berkoordinasi sekaligus melakukan penyelidikan," ujar dia.

Dihubungi terpisah, KPU mengaku masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri kebocoran data pemilih yang baru-baru ini mengemuka di situs Breach Forums. "Sekarang lagi kita minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dia menaungi Mabes," kata Koordinator Divisi Data dan Informatika KPU RI Betty Epsilon Idroos, Selasa (28/11/2023).

Ia mengaku belum dapat memastikan apakah data yang bocor tersebut terkonfirmasi data milik KPU RI atau bukan. "Sudah kita koordinasikan, lagi di-crosscheck dulu ya," tambahnya.

Sebelumnya, seorang peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut. "Jimbo" membagikan 500.000 data contoh yang berhasil ia peroleh melalui salah satu unggahan di situs BreachForums yang kerap digunakan untuk jual beli hasil peretasan. Ia juga membagikan beberapa tangkapan layar dari situs <https://cekdptonline.kpu.go.id/> untuk meyakinkan kebenaran data yang didapatkan.

Dalam unggahan itu, "Jimbo" juga mengaku menemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih.

Di dalam data yang "bocor" itu, "Jimbo" mendapatkan data pribadi, seperti NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, sampai kode kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, serta TPS. Data-data itu dijual dengan harga 74.000 dollar Amerika atau sekitar Rp 1,1 miliar. Pada tangkapan layar lainnya, "Jimbo" mengunggah foto menyerupai halaman situs KPU yang dianggap membuktikan bagaimana ia meretas situs KPU.

Tak Bermotif Politik

Terpisah, Menteri Komunikasi dan

Informatika Budi Arie Setiadi membantah dugaan kebocoran data sekitar 204 juta orang pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 dilandasi oleh motif politik, melainkan motif ekonomi.

"Kami ingin meyakinkan kalau ini tidak ada motif politik. Ini motif bisnis supaya publik jangan resah dulu, ini (motif) politik apa," kata Budi usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Budi mengatakan bahwa motif ekonomi yang mendalangi pelaku peretasan membobol data DPT menjadi kesimpulan sementara yang diyakini institusinya. "Kalau motif kita berani jamin itu kepentingan komersial, mau diperjualbelikan data itu. Kesimpulan sementara," ujarnya.

Menurut Budi, data yang diretas oleh pembobol tersebut disalahgunakan untuk diperjualbelikan di situs gelap (dark web). "Karena dijual datanya, sama yang nge-hack dijual datanya, kalau jual apa berarti? Komoditas kan. Kalau komoditas berarti apa? Ekonomi kan. Kualitas di dark web," ucapnya.

Untuk itu, Budi mengimbau publik agar tidak mengaitkan dugaan kebocoran data di situs KPU dengan muatan politis. "Justru itu makanya saya bilang ini motifnya bukan politik, motifnya ekonomi. Ini orang mau ngerampok data saja, mau ngejual jadi komoditas, gitu saja. Jadi, enggak usah dipolitisasi," tuturnya.

Budi juga mengimbau publik untuk tidak mendiskreditkan KPU selaku penyelenggara pemilu atas dugaan kebocoran data yang terjadi. "Sudah jangan kita salah-menyalahkan. Kami Kemenkominfo tidak mau menyalahkan kementerian/lembaga lain, apalagi KPU ini kan penyelenggara pemilu tumpuan kita semua, jangan sampai KPU didiskreditkan, dong!" katanya.

Sebaliknya, Menkominfo mengatakan kasus tersebut menjadi peringatan bagi KPU untuk lebih berhati-hati dalam menjamin keamanan data pemilih. "Ini juga sekaligus warning buat penyelenggara pemilu, buat menjaga sistemnya dengan baik, keamanan datanya dengan baik," ucapnya.

Budi mengatakan bahwa Kemenkominfo juga telah meminta klarifikasi kepada KPU soal dugaan kebocoran data yang terjadi. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dia menyebut masih menunggu respons dari KPU selama tiga hari terkait laporan kehilangan data.

"Kami sejak semalam sudah bersurat ke KPU, apakah betul terjadi kebocoran data. Nah, kami kan tunggu jawaban dari KPU," kata dia.

Dia pun memastikan Kemenkominfo akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait lainnya, baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Polri untuk bersama-sama merapikan dan memperkuat sistem keamanan data terkait pemilu agar

lebih baik dan berkualitas.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha menyampaikan, jika hacker Jimbo benar-benar berhasil mendapatkan kredensial dengan role Admin, hal ini bisa sangat berbahaya pada hasil Pemilu yang akan digelar pada Februari 2024. Data ini dapat digunakan untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Selain itu, data lengkap pemilih Pemilu di situs KPU tersebut bisa digunakan untuk tindak kejahatan misalnya, mengajukan pinjaman online alias pinjol mengatasnamakan oranglain.

Dengan tambahan data nama ibu kandung, pelaku bisa mengakses rekening, akun e-commerce hingga fintech milik korban. Pratama menyampaikan, berdasarkan tangkapan layar lainnya yang dibagikan oleh hacker Jimbo, nampak halaman website KPU. Oleh karena itu, ia menduga yang kemungkinan berasal dari halaman dashboard pengguna. "Kemungkinan besar Jimbo berhasil mendapatkan akses login dengan role Admin KPU dari domain sidalih.kpu.go.id menggunakan metode phishing, social engineering atau melalui malware," ujar Pratama.

"Itu membuat Jimbo dapat mengunduh data pemilih dan beberapa data lainnya," Pratama menambahkan.

Pratama menyampaikan, KPU perlu melakukan audit dan investigasi forensik dari sistem keamanan dan server KPU. "Sambil investigasi, ada baiknya tim IT KPU mengubah username dan password dari seluruh akun yang memiliki akses ke sistem, sehingga bisa mencegah akun yang sudah diretas kembali digunakan," ujarnya.

Terpisah pakar keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya mengatakan jika dilihat sistem keamanan siber milik pemerintah masih berada di level 5. "Jika 1-10, ada di angka 5, ada beberapa yang di angka 7, tapi gak ada yang lebih dari itu. Banyak juga yang masih di bawah 5," kata Alfons, Rabu (29/11/2023).

Bobolnya sistem keamanan siber pemerintah ini, bukan pertama kali. Jika mundur sedikit ke belakang atau tepat pada Juli 2023, sederet kebocoran data pernah terjadi. "Masalah kebocoran data kan kita tahu security sistem di pemerintah kita cukup lemah. Bisa terlihat dari tahun 2023, kita selalu mengalami kebocoran data, yakni pemerintah," jelasnya.

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo ini menjelaskan, upaya menjaga data dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Semuel menyebut, sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Kementerian Kominfo juga telah mengambil langkah proaktif.

"Dalam pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah dengan menerapkan sistem keamanan terhadap data pribadi," beber dia.

Lebih lanjut dia juga mengingatkan soal aturan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Kominfo juga mengingatkan kembali larangan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik," paparnya lagi.

Semmy menegaskan kalau setiap orang dilarang secara melawan hukum apabila mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya, sesuai dengan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

"Kominfo menghimbau seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) baik lingkup publik maupun privat untuk meningkatkan keandalan sistem keamanan siber dan pelindungan data pribadi dalam setiap sistem elektronik yang mereka miliki sesuai ketentuan perundang-undangan," tandasnya. (wid,rls,ist, tmp,kum/dya)

INDEKS KERAWANAN PEMILU 2024

 Rawan Tinggi
85 KAB/KOTA

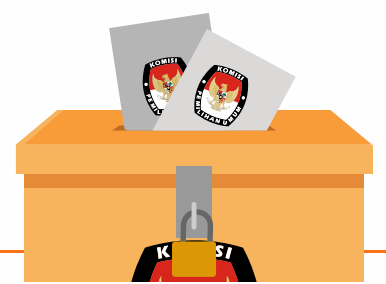
 Rawan Sedang
349 KAB/KOTA

 Rawan Rendah
80 KAB/KOTA

5 DAERAH DENGAN INDEKS KERAWANAN PEMILU 2024 TERTINGGI

Kab. Intan Jaya	100
Kab. Jayawijaya	100
Kab. Bandung	91.59
Kab. Yalimo	86.66
Kab. Mappi	82.13

Skor



Berbalas Kritik soal IKN Memanas Jokowi Ingatkan Ada UU-nya, PKS Sebut Konstitusi Bisa Diubah

JAKARTA - Pemandangan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara menjadi isu yang makin panas di masa kampanye Pemilu 2024 ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal PKS yang menegaskan komitmen partainya menolak kepindahan ibu kota ke IKN. PKS berjanji jika menang di Pemilu 2024, ibu kota akan tetap di Jakarta. Jokowi mempersilakan jika ada pihak yang memiliki pendapat demikian.

"Ya, itu pendapat, kan, boleh. Menyampaikan opini, kan, silakan," kata Jokowi di Hutan Kota Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).

Meski demikian, Jokowi menegaskan pemindahan ibu kota ke IKN sudah diatur dalam UU IKN. "Tetapi IKN sudah ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya," tegasnya.

Jokowi juga menampik pemindahan ibu kota ke IKN malah menambah ketimpangan. Menurutnya, kepindahan ibu kota ke IKN malah untuk mengatasi ketimpangan. "Kita ini tidak ingin Jawasentris tapi ingin Indonesiasentris. Karena kita ingin... 58 persen PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58 persen itu ada di pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesiasentris. Di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu," jelasnya.

Apalagi, lanjut Jokowi, populasi Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa. Sehingga dibutuhkan pemerataan ekonomi dan pemerataan penduduk. "Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini, kan, tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun. Jangka panjang," pengkasnya.

Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, langsung menyahuti pernyataan Jokowi. Meskipun IKN telah menjadi undang-undang, Al Muzammil menilai sah-sah saja apabila undang-undang itu diubah. Sebab, tak ada aturan yang melarang mengubah undang-undang.

"Kalau ingin mengubah IKN ya melalui pembahasan undang-undang itu kan sah di DPR ya kan? Konstitusi aja bisa diubah masa undang-undang engga boleh?" kata Al Muzammil kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Al Muzammil menilai bahwa pemindahan ibu kota ke IKN belum matang. Pasalnya, Undang-undang itu telah mengalami perubahan hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun setelah penetapannya. "Iya, kita kan dua kali Januari 2022 kan pengesahan yang pertama, diubah Oktober 2023



Pembangunan gardu induk berteknologi Gas Insulated Switchgear (GIS) untuk mengatangi distribusi listrik di Ibu Kota Nusantara sudah mencapai 50 persen. (dok.ist)

dalam waktu setahun 9 bulan sudah diubah, kan persiapan berarti kurang matang itu kan," ujarnya.

Sehingga, Al Muzammil menegaskan bahwa nantinya ketika PKS memenangkan Pemilu 2024, gagasan itu mengembalikan ibu kota di Jakarta akan dipertarungkan di DPR. "Ya kita ke depan kita akan memperjuangkan melalui DPR dong, perjuangan DPR kan, ya tanggung-resminya ada di DPR," tandas dia.

Menkeu Alokasikan Rp40,6 T di 2024

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan dana sebesar Rp40,6 triliun di 2024 untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sri Mulyani menjelaskan, anggaran tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), pembangunan kantor-kementerian, hingga pembangunan jalan tol.

Selain itu, anggaran juga akan difokuskan untuk pembangunan rumah susun aparatur sipil negara (ASN), pembangunan rumah tapak pejabat negara, dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. "IKN akan dialokasikan untuk tahun 2024 sebesar Rp40,6 triliun," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa tahun depan, belanja infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas pemerintah dengan anggaran mencapai Rp423 triliun.

"Rp423 triliun terutama untuk infrastruktur prioritas nasional seperti ICT, energi, pangan, dan konektivitas dan pembangunan infrastruktur di IKN," terangnya.

Sebagai informasi, tahun ini, Kementerian Keuangan mengalokasikan dana untuk pembangunan IKN sebesar Rp29,3 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menjelaskan, dari total anggaran pembangunan infrastruktur dasar IKN telah cair sebesar Rp13 triliun hingga Oktober 2023.

Isa menuturkan, porsi sebesar Rp26,3 triliun ditujukan untuk infrastruktur, sementara sebesar Rp3 triliun ditujukan untuk non-infrastruktur yang meliputi perencanaan, pemetaan, pengamanan, dan hal lainnya. "Pembangunan istana negara, kawasan inti pusat pemerintahan, jalan tol, pemukiman, jembatan Pulau Balang, inisiasi bandara VVIP misalnya itu masuk dalam anggaran infrastruktur," papar Isa.

Sebelumnya, Calon presiden nomor satu Anies Baswedan mengatakan jika terpilih menjadi Presiden RI, dia akan mengkaji ulang regulasi penetapan Ibu Kota Negara (IKN). Hal tersebut disampaikan Anies ketika mengikuti serangkaian diskusi Desak Anies di Kota Bandung, Jawa Barat.

"Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta. Dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kami akan kaji ulang itu semua," kata Anies melalui keterangan tertulis.

Anies menyoroti anggaran yang begitu besar untuk IKN. Anies mengklaim dana sebesar Rp 460 triliun dapat dimanfaatkan ke sektor lainnya, mulai dari kesehatan sampai kesejahteraan rakyat, misalnya membangun Puskesmas. Tak hanya itu, dana IKN yang dianggarkan dapat dialokasikan untuk mengangkat kesejahteraan jutaan guru berstatus Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), polisi, tentara dan masih banyak lagi. (wid,rls,ist/dya)



5 NEGARA YANG GAGAL MEMINDAHKAN IBU KOTA NEGARA

1. MYANMAR

Myanmar telah memutuskan memindahkan ibu kota negaranya dari Yangon ke Naypyidaw. Rencana ini diinisiasi pada 2001 dan berhasil diselesaikan pada 2005. Naypyidaw ditetapkan sebagai kota administratif, lalu seluruh fungsi pemerintahan dipindahkan ke sana pada 2006. Meskipun segala infrastruktur telah dibangun, termasuk jalan, hotel, dan pusat perbelanjaan, tetapi ibu kota baru ini menghadapi kehampaan.

2. AUSTRALIA

Melbourne dan Sydney pernah bersaing untuk menjadi ibu kota negara Australia. Untuk mengatasi persaingan antara kedua kota tersebut, pemangku kebijakan lokal memutuskan mendirikan Canberra sebagai ibu kota baru pada 1913. Pada 1996, Perdana Menteri John Howard memutuskan untuk pindah ke Kirribilli House yang menghadap Pelabuhan Sydney. Bahkan, Mantan Perdana Menteri Paul Keating menyatakan bahwa Canberra merupakan salah satu kesalahan terbesar Australia dan seharusnya segera ditinggalkan.

3. MALAYSIA

Pada 1999, Malaysia memutuskan untuk memindahkan ibu kota negaranya ke Putrajaya, yang ditunjuk sebagai kota administratif. Namun, upaya pemindahan tersebut dianggap tidak berhasil karena sebagian besar pegawai pemerintah Malaysia enggan beralih ke ibu kota negara yang baru. Selain itu, kendati Kantor Perdana Menteri telah dipindahkan ke Putrajaya, pusat perekonomian dan Gedung Parlemen tetap berlokasi di Kuala Lumpur.

4. KAZAKHSTAN

Pada 1997, Kazakhstan memutuskan memindahkan ibu kota negaranya dari Almaty ke Astana. Alasannya, Almaty sudah terlalu padat dan rentan terhadap gempa bumi. Namun, setelah pemindahan ke Astana, Kazakhstan dikabarkan mengalami tekanan ekonomi.

5. TANZANIA

Tanzania memutuskan untuk memindahkan ibu kota negaranya dari Dar es Salaam ke Dodoma pada 1970-an. Meskipun Majelis Nasional Tanzania telah dipindahkan ke Dodoma, upaya pemindahan tersebut dianggap tidak berhasil karena perkembangan di ibu kota yang baru terbilang lambat. Sementara Dar es Salaam malah mengalami pertumbuhan yang lebih pesat. Selain itu, meskipun Majelis Nasional telah dipindahkan, seluruh kedutaan asing dan kantor pemerintahan masih tetap berada di Dar es Salaam.